

## **MANAJEMEN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLWAN (STUDI PADA SEPOLWAN LEMDIKLAT POLRI)**

### **Sugiarto**

Universitas Negeri Jakarta  
Email: [sugiarto@unj.ac.id](mailto:sugiarto@unj.ac.id)

### **Matin**

Universitas Negeri Jakarta  
Email: [matin@unj.ac.id](mailto:matin@unj.ac.id)

### **Sitairesmi**

Universitas Negeri Jakarta  
Email: [sitaresmi.sita@gmail.com](mailto:sitairesmi.sita@gmail.com)

**Abstract:** This research is to describe the management curriculum of education for the formation of the Women's Police Bintara at the Polri Women's School of Education and Training including the planning, organizing, implementing, evaluating and obstacles in curriculum management. Data obtained through interviews, observation and documentation. The results showed that curriculum planning was carried out through working group meetings to discuss the objectives, content, methods and evaluation of the curriculum to be used. Organizing the curriculum is carried out by the process of grouping and analyzing the structure, subject matter, learning load and length of lesson hours. In addition, there are also human resource arrangements related to curriculum implementation. The implementation of the curriculum is implemented in a learning process which is divided into three stages and parenting activities. The curriculum evaluation is carried out, namely the evaluation of student learning outcomes and evaluation of the overall curriculum. For the assessment of students, there are three aspects of the assessment, namely academic, mental personality and health and physical fitness. Problems in curriculum management are problems related to curriculum components.

**Keyword:** *curriculum management, education formation of non-commissioned officer women police*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen kurikulum pendidikan pembentukan Bintara Polisi Wanita di Sekolah Polisi Wanita Lemdiklat Polri mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi serta permasalahan dalam manajemen kurikulum. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kurikulum dilaksanakan melalui rapat kelompok kerja membahas tentang tujuan, isi, metode dan evaluasi kurikulum yang akan digunakan. Pengorganisasian kurikulum dilaksanakan proses mengelompokkan dan menganalisis struktur, materi pelajaran, beban belajar, lama jam pelajaran serta pengaturan SDM. Pelaksanaan kurikulum diimplementasikan dalam proses pembelajaran yang terbagi dalam tiga tahap dan kegiatan pengasuhan. Evaluasi kurikulum yang dilaksanakan yaitu evaluasi hasil belajar peserta didik dan evaluasi kurikulum secara keseluruhan. Untuk penilaian peserta didik, ada tiga aspek penilaian yaitu akademik, mental kepribadian serta kesehatan dan kesamaptaaan jasmani. Permasalahan dalam manajemen kurikulum yaitu permasalahan yang terkait dengan komponen kurikulum.

**Kata Kunci:** *manajemen kurikulum, pendidikan pembentukan Bintara Polwan*

## PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu institusi pemerintah yang memegang peranan penting dalam menjaga keutuhan NKRI. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Meningkatnya IPTEK serta terjadinya pelbagai persoalan sosial yang dinamis, mengakibatkan situasi kondisi keamanan domestik akan dihadapkan pada berbagai jenis tindakan kriminal seperti kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan yang dimiliki oleh negara dan kejahatan yang mempunyai implikasi terhadap situasi yang bersifat kontijensi. Dari segi pola teknologi serta modusnya, tindak kejahatan juga semakin berkembang dan modern. Di samping itu, unjuk kerja Polri termasuk dari segi pelayanan dituntut untuk maksimal dalam memenuhi harapan masyarakat serta mengurangi kritikan masyarakat yang semakin meningkat.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Bayu (2015) tentang peningkatan profesionalisme dari anggota Polri terkait untuk memenuhi harapan masyarakat di Bengkulu, mengungkapkan bahwa harapan masyarakat terhadap kompetensi dan profesionalisme anggota Polri relatif tinggi, yang berarti bahwa setiap anggota Polri harus memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan apa yang telah menjadi kewajibannya dengan baik dan profesional terutama dalam memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman pada masyarakat.

Mendapati kondisi demikian, Polri perlu berikap responsif dengan terus berbenah diri guna meningkatkan profesionalisme kerja. Polri memerlukan *human resources* yang profesional, modern, terpercaya, bermoral, dan unggul. Berbagai upaya dapat membentuk SDM Polri sesuai dengan kriteria yang diharapkan tersebut.

Salah satu faktor penting untuk dapat mewujudkan SDM Polri yang diinginkan yaitu melalui pendidikan. Bentuk Pendidikan Polri salah satunya yaitu Pendidikan Pembentukan Bintara Polwan. Pendidikan Pembentukan Bintara Polwan (Diktukba Polwan) merupakan program pendidikan yang membentuk dan membekali peserta didik menjadi pegawai

negeri pada Polri, yang ditujukan bagi anggota masyarakat khususnya wanita yang memenuhi persyaratan yang ingin menjadi anggota Polri.

Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D sebagai Kapolri, dalam acara rilis akhir tahun 2018 di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta Selatan, menjelaskan bahwa saat ini anggota polisi wanita baru 36.595 orang atau 8,3% dari jumlah keseluruhan 443.379 anggota Polri. Hal ini belum menggambarkan prinsip *equality* dan emansipasi, untuk itu Tito berharap ke depannya Staf Sumber Daya Manusia Polri mampu menaikkan kuota Polwan pada saat rekrutmen anggota. Selain itu, mengapa kuota Polwan harus ditambah? Jumlah polwan perlu ditambah dengan alasan sebagaimana yang disampaikan oleh Jenderal Tito bahwa Polwan memiliki beberapa kelebihan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diantaranya, sebagai anggota Polisi, Polwan lebih humanis, lebih baik dalam pelayanan publik, lebih kuat menghadapi praktik suap dan korupsi serta cocok untuk kasus perempuan dan anak. Oleh sebab itu, setiap Polwan sepatutnya mendapat pendidikan polisi yang berkualitas mulai dari integritas sampai ilmu kepolisian.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, salah satu komponen pentingnya yaitu

kurikulum. Kurikulum secara garis besar diartikan sebagai pedoman pembelajaran yang berisi seperangkat rencana. Dari kurikulum tersebut akan menjadi ukuran atas mutu suatu lembaga pendidikan. Sekolah Polisi Wanita Lemdiklat Polri salah satu tugasnya yaitu melaksanakan pendidikan pembentukan Bintara khusus untuk membentuk Bintara Polisi Wanita.

Tujuan dari Diktuk Bintara Polwan yaitu menghasilkan Bintara Polisi Wanita sebagai insan Bahayangkara yang memiliki sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan tugas umum Kepolisian, didukung dengan kondisi fisik yang samapta untuk melaksanakan tugas sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang mahir, terpuji, patuh hukum, dan unggul.

Untuk mencapai tujuan di atas, Sepolwan Lemdiklat Polri harus memiliki formulasi kurikulum yang terarah dan jelas. Dikatakan demikian, berdasarkan fungsi kurikulum yang dipaparkan oleh para ahli bahwa fungsi kurikulum salah satunya yaitu sebagai perangkat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum memiliki berbagai elemen pokok dan sistematis yang berkorelasi satu sama lain. Oleh karena itu, untuk mengatur semua komponen yang terkait dengan kurikulum,

dibutuhkan manajemen kurikulum yang baik.

Selain untuk meningkatkan mutu suatu lembaga pendidikan perlu menerapkan manajemen kurikulum yang baik. Seperti yang dikatakan oleh Khoirudin (2013) bahwa pengaplikasian manajemen kurikulum secara profesional oleh lembaga pendidikan akan mewujudkan output lulusan yang berkualitas yang mampu membentuk lulusannya agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menjalani kehidupan.

Selama pelaksanaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polwan, terdapat beberapa permasalahan. Berdasarkan Rencana Kerja Satker Sepolwan Lemdiklat Polri Tahun Anggaran 2019, ditemukan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam analisis SWOT pada Sepolwan, yaitu a) fasilitas pendukung pendidikan yang kurang laik seperti ruang kelas yang kecil, kursi belajar, laboratorium komputer, gudang alins, ruang pengasuh, ruang transit pendidikan nonorganik dan alin alongins (komputer); b) belum semuanya tenaga pendidik Sepolwan yang memiliki pengalaman tugas di kewilayahan; c) anggaran yang disediakan untuk mendukung penyelenggaraan operasional pendidikan masih kurang. Di samping itu, terdapat perubahan dalam masyarakat yaitu pola hidup yang menuju ke arah

konsumtif, apabila tidak disikapi dengan bijak dapat menimbulkan menurunnya kinerja personel (tenaga pendidik maupun peserta didik) dan kecemburuan sosial.

Hal tersebut di atas, sedikit banyak menggambarkan sebagaimana riset yang telah dilaksanakan oleh Juhana Zulfan dalam disertasinya yang berjudul Evaluasi Program Pengelolaan Sekolah Polisi Wanita dalam Menyelenggarakan Pendidikan Pembentukan Brigadir Tugas Umum Polwan Angkatan XLIII Tahun Anggaran 2014 didapatkan hasil yaitu produk hasil didik belum optimal karena masih terdapat siswa yang tidak lulus, dan secara kualitas masih terdapat siswa pada aspek tertentu mendapat nilai di bawah rata-rata umum. Kurang optimalnya pencapaian hasil pendidikan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor intern maupun ekstern baik langsung maupun tidak langsung. Pengaruh faktor internal antara lain inteks (calon siswa) masih ada yang kurang berkualitas, kurikulum dan bahan ajar yang kurang fokus terhadap kompetensi dan profil lulusan, kuantitas dan kualitas tenaga pendidik, kependidikan dan pengasuh masih belum seluruhnya memenuhi kompetensi, fasilitas pendidikan secara kuantitas kurang dan kualitasnya sudah banyak yang rusak ringan dan rusak berat, serta anggaran yang belum maksimal mendukung

kebutuhan operasional pendidikan. Sedangkan faktor eksternal antara lain belum dilibatkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam usaha menambah kualitas pelayanan pendidikan serta faktor lingkungan yang kurang mendukung kondisi pendidikan Sepolwan.

Terkait dengan kuantitas dan kualitas pendidik, jumlah tenaga pendidik yang dimiliki oleh Sepolwan sebanyak 122 orang. Berdasarkan laporan analisis evaluasi tenaga pendidik pendidikan pembentukan tahun 2019 bahwa dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu: 1) masih terdapat pendidik belum mengikuti sertifikasi sebanyak 73 orang (60%); 2) adanya beberapa pendidik yang memasuki masa purnatugas sebanyak 5 orang; 3) terdapat pendidik yang sudah lama berdinis di Sepolwan perlu mendapatkan pengayaan terkini di lapangan serta kurangnya pendidik yang mempunyai pengalaman terkini di lapangan khususnya mata pelajaran Fungsi Teknis Kepolisian sebanyak 71 orang.

Selain permasalahan dari segi tenaga pendidik, terdapat juga dari kurikulum. Secara lebih khusus terkait dengan komponen kurikulum yang terdiri dari tujuan, isi, metode dan evaluasi, ditemukan beberapa permasalahan. Pada tujuan dalam kurikulum, rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) belum

mengakomodir rumusan komponen pengasuhan dan rumusan SKL masih pendekatan mata pelajaran. Rumusan indikator hasil belajar masih banyak yang bersifat teori dan luasnya indikator hasil belajar dalam silabus tidak berimbang dengan jumlah jam pelajaran. Selain itu, kurikulum yang diimplementasikan saat ini, pada rumusan SKL Keterampilan Kerja Umum tidak mengakomodir materi ABH dan PPA mengingat Polwan dalam penugasan nanti di lapangan salah satunya akan menghadapi dan menangani kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak.

Pada isi kurikulum, ketika dijabarkan dalam Rangka Pelajaran Terurai sulit diperasionalkan, beban belajar yang banyak tetapi jumlah jam pelajarannya terbatas. Pada bahan ajar yang digunakan, ada penambahan dan pengurangan jam pelajaran dan kompetensi dasar namun isi materi tetap. Untuk bahan ajar, isi kurang memberikan contoh/studi kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan, kurang memberikan rangsangan peserta didik untuk belajar mandiri serta masih kurang memberikan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan latar belakang peserta didik yang heterogen sehingga mempengaruhi dalam mencapai kompetensi yang diharapkan.

Pada evaluasi, untuk penilaian kesehatan belum ada pedoman yang baku/jelas tentang proses yang perlu dinilai. Pada penilaian kesehatan berdasarkan hasil tes kesehatan dari panitia daerah saat seleksi masuk yang dijadikan sebagai data awal. Selanjutnya peserta didik selama mengikuti pendidikan, satuan pendidikan melakukan penilaian.

Pada proses pengembangan kurikulum secara umum, terdapat juga permasalahan. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Markum dalam disertasinya yang berjudul Manajemen Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Polri didapatkan hasil bahwa pengembangan kurikulum pendidikan Polri secara umum telah memperhatikan pertimbangan yang diperlukan dan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan tren perkembangan kamtibmas, kebutuhan organisasi serta tuntutan kebutuhan masyarakat, serta telah mengakomodir hasil analisis tugas dan tantangan tugas Polri, namun SDM yang mengawaki masih banyak yang belum kompeten di bidang kurikulum. Selain itu, pengembangan kurikulum pendidikan Polri tidak selalu diikuti dengan evaluasi dan kajian secara mendalam tentang pencapaian kompetensi lulusan/hasil didik setiap pendidikan Polri, serta isi materi dan metode yang dirumuskan dalam kurikulum, apakah

sudah sesuai, relevan dan tepat untuk memenuhi tuntutan tugas di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen kurikulum pendidikan pembentukan Bintara Polwan yang dilaksanakan di Sepolwan Lemdiklat Polri yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.

Rusman (2018) berpendapat bahwa manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan hal utama di satuan pendidikan sekolah dengan prinsip proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik.

Dikaitkan dengan fungsi-fungsi manajemen, tahapan manajemen kurikulum disebutkan oleh Wahyudin (2014) bahwa manajemen kurikulum yang dilaksanakan di sekolah melalui empat tahap yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Tahapan manajemen ini harus dilaksanakan oleh sekolah apabila tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum ingin terwujud sesuai dengan yang diharapkan.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disintesis bahwa manajemen kurikulum adalah proses mengelola

kurikulum yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan kurikulum pendidikan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien. Proses tersebut terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.

Menurut Rusman (2018), perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa. Agar sebuah kurikulum memberikan hasil yang optimal, maka harus direncanakan mulai dari desainnya, implementasinya, sampai kepada evaluasinya.

Jika dikaji lebih mendalam tentang komponen-komponen apa saja yang perlu direncanakan, secara sederhana dapat dideskripsikan sebagai berikut: 1) tujuan, diperlukan untuk memberikan arah pada kegiatan yang dilakukan; 2) isi, merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan; 3) aktivitas belajar, adalah berbagai aktivitas yang diberikan para pembelajaran dalam situasi belajar-mengajar; 4) sumber belajar, sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan antara lain buku dan bahan cetak, perangkat lunak komputer,

media audiovisual; 5) evaluasi, berguna untuk mengetahui tingkat ketercapaian pelaksanaan tujuan, dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan terbuka (Wahyudin, 2014).

Ada tiga langkah dalam proses pengorganisasian: (1) perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi, (2) pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logik dapat dilaksanakan oleh satu orang dan (3) pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis.

Pengorganisasian kurikulum merupakan proses menyusun organisasi kurikulum secara formal dengan aktivitas merancang struktur, menganalisis beban materi pelajaran, menganalisis kualifikasi materi pelajaran, mengelompokkan dan membagikan beban materi pelajaran pada tiap-tiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan (Triwiyanto, 2015).

Miller dan Seller (1985) menyatakan bahwa implementasi kurikulum merupakan suatu penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan berubah.

Implementasi kurikulum dimaksud bagaimana sebuah kurikulum yang bersifat tertulis diwujudkan menjadi aktual dalam bentuk serangkaian aktivitas pembelajaran.

Tidak jauh berbeda definisi implementasi kurikulum oleh Saylor dan Alexander (1974) memaknai implementasi kurikulum sebagai suatu proses aktualisasi kurikulum dalam proses pembelajaran. Artinya kurikulum diimplementasikan ke dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran dapat dilakukan di dalam maupun luar kelas.

Arikunto dan Safruddin (2009) menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Terkait dengan kurikulum, Sukmadinata (2017) menyatakan bahwa evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya, maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum. Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa hasil-hasil dari evaluasi kurikulum dijadikan bahan pertimbangan bagi pemegang kebijakan pendidikan dan pengembang kurikulum untuk menentukan langkah kebijakan lebih lanjut.

Evaluasi menurut Tyler adalah “*the process for determining the degree to which these change in behaviour are actually taking place*”. Evaluasi berfokus pada upaya untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar. Hasil belajar tersebut biasanya diukur dengan tes.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Sekolah, Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Bagian Tenaga Pendidik, Kepala Sub Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan, dan Tenaga Pendidik. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan analisis dokumen. Instrumen penelitian adalah peneliti dan pedoman wawancara, pedoman observasi dan analisis dokumen. Analisis data menggunakan analisis interaktif Miles-Huberman terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL**

### **Perencanaan Kurikulum Diktukba Polwan**

Perencanaan Kurikulum Pendidikan Pembentukan Bintara Polwan di Sepolwan Lemdiklat Polri dijadikan sebagai arah

pedoman penyelenggaraan aktifitas pembelajaran.

Proses penyusunan kurikulum pendidikan pembentukan Bintara Polwan dilaksanakan sebelum pelaksanaan pendidikan pembentukan Bintara dibuka dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Dalam penyusunan kurikulum berdasar pada peraturan-peraturan yang terkait dengan Pendidikan Polri serta dilakukan pengembangan kurikulum yang sesuai

Merujuk pada Perkal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kurikulum Induk Pendidikan Polri, dasar penyusunan kurikulum yaitu a) analisis tugas, kebutuhan organisasi dan masyarakat, b) rumusan profil dan kompetensi fungsi kepolisian, c) hasil kajian yang dilakukan internal Polri maupun eksternal Polri, d) perkembangan lingkungan strategis, e) hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum, dan f) kebijakan pimpinan nasional dan pimpinan Polri. Penyusunan kurikulum pendidikan dilaksanakan melalui rapat dalam bentuk kelompok kerja yang diselenggarakan oleh Lemdiklat Polri yang melibatkan Lemdiklat Polri (Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan), Satuan Pendidikan, Satuan Pembina Fungsi, dan tenaga ahli (ahli pendidikan/praktisi pendidikan). Adapun perencanaan kurikulum diawali dengan permintaan Lemdiklat Polri kepada satuan

pendidikan yang melaksanakan Diktuk Bintara berupa saran/masukan hasil analisis kebutuhan pendidikan. Selain itu, beberapa hal yang telah disebutkan di atas sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kurikulum. Secara umum, penyusunan kurikulum melalui tahapan 1) penyusunan draf, 2) review, revisi, dan finalisasi, dan 3) pengesahan.

Dalam rapat pokja dirumuskan tentang tujuan pendidikan, standar kompetensi lulusan, waktu dan pentahapan, materi pelajaran, metode pembelajaran, penilaian dan persyaratan calon peserta didik. Masing-masing pihak yang terlibat dalam penyusunan kurikulum memiliki peran dan tanggung jawab. Rapat pokja ini dibagi lagi ke dalam tim pokja kecil yang dibagi untuk membahas beberapa materi pelajaran yang mengalami revisi. Dari rapat pokja yang dilaksanakan, dihasilkan draf kurikulum, daftar materi pelajaran, dan silabus, setelah itu masuk tahap finalisasi untuk selanjutnya disahkan oleh Kalemndiklat Polri. Hasil penyusunan kurikulum oleh Pokja ini yaitu diterbitkannya Keputusan Kalemndiklat Polri tentang Kurikulum Pendidikan Pembentukan Bintara Polri.

### **Pengorganisasian Kurikulum Diktukba Polwan**

Dalam pengorganisasian kurikulum, dilaksanakan proses

mengelompokkan dan menganalisis struktur, materi pelajaran, beban belajar serta lama jam pelajaran. Selain itu juga dilakukan pengaturan aspek-aspek lainnya termasuk pengaturan sumber daya manusia sebagai faktor penting berlangsungnya operasional pendidikan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif.

Penetapan kelompok mata pelajaran didasarkan atas tujuan program pendidikan yang telah ditetapkan dan hasil pembahasan yang melibatkan pembina fungsi, Lemdiklat Polri, satuan pendidikan dan tenaga ahli (narasumber) di mana dihasilkan sebuah struktur kurikulum pendidikan.

Struktur Kurikulum Diktuk di lingkungan Polri meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh selama pendidikan dan disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan. Penetapan kelompok mata pelajaran dapat dianalisis bahwa struktur kurikulum pendidikan pembentukan Bintara Polwan sebagai berikut: a) rumpun mata pelajaran ada lima antara lain Kepribadian, Pengetahuan Sosial dan Umum, Hukum, Profesi Teknis Kepolisian dan Jasmani, b) jenis mata pelajaran, terdapat 25 mata pelajaran, c) jumlah jam pelajaran secara keseluruhan

berjumlah 1400 jam pelajaran, d) tahapan pembelajaran, ada tiga tahap yaitu Tahap Pembentukan Dasar Bhayangkara, Tahap Pembekalan Profesi Kepolisian dan Tahap Pembulatan.

Penyusunan jadwal pelajaran dan jadwal kegiatan di luar mata pelajaran disusun oleh Satuan Pendidikan (Sepolwan). Di Sepolwan, penyusunan jadwal pelajaran diatur oleh Bagian Diklat dengan berpedoman pada petunjuk yang ada baik dari Kalemdiklat Polri maupun Kasepolwan (Juknis dan Juklak). Untuk jadwal kegiatan di luar mata pelajaran masuk dalam pola pengasuhan yang menyusun yaitu Bagian Pembinaan Siswa.

Tenaga Pendidik (Gadik) merupakan komponen penting dalam pelaksanaan kurikulum. Gadik bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat. Di Sepolwan, Gadik dikoordinir dan diawasi oleh Bagian Tenaga Pendidik Sepolwan.

Salah satu tugas Gadik yaitu mengajar. Pembagian tugas Gadik untuk mengajar berpedoman pada jadwal pelajaran yang dibuat oleh Bagian Diklat, kemudian personel yang ditunjuk untuk mengajar diberikan surat perintah Kasepolwan untuk mengajar. Gadik

biasanya mengajar dalam bentuk tim. Tim dibagi sesuai jumlah kelas. Tiap tim dibagi atas Gadik yang senior dan junior. Setiap anggota tim diberikan kesempatan untuk mengajar.

Untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, maka diadakan pelatihan kemampuan tenaga pendidik dilaksanakan tiap setahun sekali sesuai yang ada pada DIPA Sepolwan tahun berjalan. Materi peningkatan kemampuan pendidik disesuaikan dengan materi assessmen sebagai persiapan untuk assessmen.

#### **Pelaksanaan Kurikulum Diktukba Polwan**

Pelaksanaan kurikulum Diktuk Bintara Polwan diwujudkan melalui kegiatan proses pembelajaran, pembulatan dan pengasuhan.

Pelaksanaan proses pembelajaran dibagi dalam tiga tahap, yaitu kesatu Tahap Pembentukan Dasar Bhayangkara, tahap dilaksanakannya penanaman nilai-nilai luhur dan karakter sebagai insan Bhayangkara yang diwujudkan dalam sikap, perilaku dan penampilan fisik sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Materi pada tahap I ini meliputi orientasi lingkungan (Bintra), revolusi mental, dan penutupan Dasar Bhayangkara (*outbond*) dan dilaksanakan selama 2 bulan/444 JP. Kedua, Tahap

Pembekalan Profesi Kepolisian, tahap yang berisi pemberian pengetahuan, keterampilan teknik dan taktik tugas kepolisian serta pengetahuan fungsi teknik kepolisian lainnya dalam pelaksanaan tugas sebagai Bintara Polri. Lamanya 4,5 bulan/820 JP. Ketiga, Tahap Pembulatan, yaitu pemberian pengalaman belajar yang merupakan suatu rangkuman dari semua mata pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya meliputi simulasi implementasi kemampuan polisi tugas umum dalam bentuk Simulasi Polsek, Latihan Teknis, Latihan Kerja yang dilaksanakan di Polda-polda dan ceramah pembekalan yang diberikan oleh para pejabat utama Mabes Polri. Tahap ini dilaksanakan selama 0,5 bulan/136 JP.

Untuk melengkapi pelaksanaan pembelajaran di atas, dilaksanakan kegiatan pengasuhan dan kegiatan pembelajaran lain setelah jam sekolah usai.

Pengasuhan dibagi dalam tiga tahap, antara lain tahap pengenalan mental, tahap pembentukan mental kepribadian, dan tahap pemantapan mental. Dalam pelaksanaannya dapat digunakan berbagai metode pengasuhan antara lain: ceramah, visualisasi dan kunjungan; penugasan dan pembiasaan; peran dan penugasan.

Untuk kegiatan pembelajaran lain seperti pembinaan rohani, pembinaan samapta dan pembinaan konseling.

Selain kegiatan di atas, terdapat kegiatan pola pengasuhan untuk mendukung kompetensi yang dibutuhkan di kewilayahan antara lain *beauty class*, pelatihan MC dan dirijen serta latihan mengendarai motor gede.

### **Evaluasi Kurikulum Diktukba Polwan**

Ada dua evaluasi kurikulum, pertama, evaluasi kurikulum secara keseluruhan dilaksanakan oleh Lemdiklat Polri khususnya Bagian Kurhanjar Diktuk Biro Kurikulum. Tujuan dari evaluasi kurikulum yaitu untuk mendapatkan informasi, masukan dan pelaksanaan kurikulum serta hambatan/kendala yang dihadapi pada satuan pendidikan. Hasil evaluasi kurikulum ini digunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam menentukan kebijakan pendidikan pembentukan Bintara di tahun berikutnya. Dalam evaluasi kurikulum ini juga diberikan rekomendasi upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka revisi dan penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Pembentukan Bintara Polri. Produk akhir evaluasi kurikulum berupa laporan analisis dan evaluasi kurikulum. Tindak lanjut dari hasil evaluasi kurikulum akan dibahas pada rapat pokja penyusunan kurikulum pada tahun berikutnya. Laporan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemegang kebijakan untuk

penyusunan kurikulum ditahun berikutnya secara khusus dan perbaikan penyelenggaraan Program Pendidikan Pembentukan Bintara Polwan di tahun berikutnya. Kedua, evaluasi kurikulum yang diselenggarakan Sepolwan Lemdiklat Polri adalah evaluasi peserta didik. Tujuannya yaitu mengetahui status kecakapan belajar peserta didik dalam menyerap materi yang diterima selama pendidikan. Menilai hasil belajar peserta didik sebagai akibat kegiatan belajar dalam jangka waktu tertentu, yang meliputi perubahan aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomotorik serta membandingkan tingkat perkembangan peserta didik dalam penyelesaian beban belajar yang ditetapkan.

Evaluasi peserta didik mengacu pada Peraturan Kalemdiklat Polri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Penilaian Pendidikan Polri meliputi 1) aspek akademik yaitu untuk menilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan, 2) aspek mental kepribadian yaitu untuk menilai kompetensi sikap, tata nilai, dan kepribadian, dan 3) aspek kesehatan dan kesamaptaan jasmani yaitu untuk menilai kondisi kesehatan dan kesamaptaan jasmani. Evaluasi hasil belajar dikaitkan dengan pencapaian standar kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran. Untuk kompetensi

pengetahuan dan keterampilan bentuknya ujian tertulis, penugasan, dan pengamatan terhadap keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran. Untuk kompetensi sikap bentuknya pengamatan, penilaian diri, sosiometri dan catatan pendidik dengan menggunakan instrumen pengamatan dan pedoman sosiometri, sedangkan penilaian kesehatan dengan pemeriksaan kesehatan dan penilaian kesamaptaaan jasmani dengan tes kesamaptaaan jasmani.

Produk yang dihasilkan dari evaluasi peserta didik yaitu laporan hasil belajar peserta didik yang disajikan dalam bentuk transkrip rekap nilai hasil belajar peserta didik yang diberikan pada saat pelantikan sebagai anggota Polri.

Dalam pelaksanaan manajemen kurikulum, terdapat beberapa permasalahan dari berbagai faktor. Dari segi perencanaan kurikulum, waktu perencanaan yang kurang tepat sehingga penerbitan kurikulum menjadi tergesa-gesa dan kurang dikaji secara mendalam oleh setiap satuan pendidikan. Selain itu, para penyusun kurikulum yang terlibat sering tidak memperhatikan KTSP dan tidak menyesuaikan dengan perkembangan situasi kondisi yang terjadi di lapangan ditambah kurangnya pengetahuan personel tentang pengembangan kurikulum.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian, manajemen kurikulum Diktukba Polwan sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan fungsi dalam manajemen. Diawali dengan perencanaan (isi, tujuan, metode dan evaluasi), pengorganisasian (SDM dan sumber daya lainnya), pelaksanaan (proses pembelajaran dan kegiatan lainnya) sampai evaluasi kurikulum (evaluasi hasil belajar peserta didik dan evaluasi kurikulum secara keseluruhan). Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat permasalahan yang dihadapi. Untuk itu untuk mengoptimalkan pelaksanaan manajemen kurikulum pada Pendidikan Pembentukan Bintara Polwan diperlukan berbagai upaya bagi para *stakeholder* untuk memahami bagaimana mengatasi permasalahan dalam manajemen kurikulum.

## **SIMPULAN**

Perencanaan Kurikulum Diktuba Polwan dilakukan melalui rapat kelompok kerja penyusunan kurikulum yang dilaksanakan sebelum Diktukba dibuka yang melibatkan Lemdiklat Polri, pembina fungsi, satuan pendidikan, dan tenaga ahli (narasumber). Penyusunan berpedoman pada peraturan-peraturan yang terkait dengan pendidikan Polri.

Perencanaan kurikulum disusun berdasarkan beberapa hal, meliputi a)

analisis tugas, kebutuhan organisasi dan masyarakat, b) rumusan profil dan kompetensi fungsi kepolisian, c) hasil kajian yang dilakukan internal Polri maupun eksternal Polri, d) perkembangan lingkungan strategis, e) hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum, dan f) kebijakan pimpinan nasional dan pimpinan Polri.

Tahapan penyusunan kurikulum meliputi: 1) penyusunan draf, 2) review, revisi, dan finalisasi, dan 3) pengesahan. Adapun yang dibahas dalam perencanaan kurikulum Diktukba Polwan meliputi petunjuk umum, daftar materi pelajaran, dan silabus. Kurikulum yang telah disusun kemudian disahkan dan disosialisasikan kepada Satuan Pendidikan (Sepolwan Lemdiklat Polri).

Dalam pengorganisasian kurikulum, dilaksanakan proses mengelompokkan dan menganalisis struktur, materi pelajaran, beban belajar serta lama jam pelajaran. Selain itu juga dilakukan pengaturan sumber daya manusia sebagai faktor penting berlangsungnya operasional pendidikan. Pengaturan sumber daya manusia contohnya seperti penunjukkan personel sebagai tenaga pendidik dan pengasuh, pembagian tugas mengajar bagi gadik dan pelatihan peningkatan kemampuan bagi tenaga pendidik.

Pelaksanaan kurikulum Diktuba Polwan direalisasikan dalam bentuk

kegiatan pembelajaran dan pengasuhan. Tahapan proses pembelajaran dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu Tahap Pembentukan Dasar Bhayangkara, Tahap Pembekalan Profesi Kepolisian, dan Tahap Pembulatan.

Kegiatan pengasuhan merupakan upaya untuk menanamkan dan mengembangkan pemikiran dan kreativitas dalam rangka mewujudkan kedewasaan peserta didik. Pengasuhan dalam tiga tahap, antara lain tahap pengenalan mental, pembentukan mental kepribadian, dan tahap pematapan mental.

Evaluasi kurikulum dilaksanakan untuk menilai hasil belajar peserta didik dan menilai implementasi kurikulum secara keseluruhan.

Evaluasi hasil belajar peserta didik berpedoman pada Peraturan Kalemduktat Polri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Penilaian Pendidikan Polri. Penilaian mencakup aspek akademik, aspek mental kepribadian, aspek kesamaptaaan jasmani. Bentuk evaluasinya ujian tertulis, penugasan, pengamatan terhadap keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran, penilaian diri dan sosiometri sedangkan penilaian kesehatan dengan pemeriksaan kesehatan dan penilaian kesamaptaaan jasmani dengan tes kesamaptaaan jasmani.

Evaluasi kurikulum satuan pendidikan bertujuan untuk mendapatkan informasi, masukan implementasi dan hasil KTSP pada satuan pendidikan. Evaluasi dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan Lemdiklat Polri yang dilakukan setelah KTSP dioperasionalkan setiap tahun.

Permasalahan dalam manajemen kurikulum yaitu permasalahan yang terkait dengan komponen kurikulum (isi, tujuan, metode dan evaluasi).

#### DAFTAR REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi dan Cepri Safruddin A.J. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Juhana, Zulfan. (2014). *Evaluasi Program Pengelolaan Sekolah Polisi Wanita dalam Menyelenggarakan Pendidikan Pembentukan Brigadir Tugas Umum Polwan Angkatan XLIII Tahun Anggaran 2014*. Disertasi Program Doktor. Universitas Negeri Jakarta.
- Khoirudin, M Arif., (2013). *Manajemen Kurikulum dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Tribakti : Jurnal Pemikiran Keislaman. Vol. 24, No.1, 58.
- Markum. (2016). *Manajemen Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Disertasi Program Doktor. Universitas Negeri Jakarta.
- Miller, J.P dan Seller, W. (1985). *Curriculum Perspectives and Practices*. New York: Longman.
- Milles, Matthew dan A. Michael Hubberman. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, Lexy J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Parkay, F.W., Hass, G.J and Anctil, E.J. (2010). *Curriculum Leadership: Readings for Developing Quality Educational Programs (9th ed)*. Boston: Pearson Education Inc.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Polri.
- Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kurikulum Induk Pendidikan Polri.
- Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Penilaian Pendidikan Polri.
- Prabowo, Bayu Catur, Slamet Widodo dan Nasution. (2015). *Analisis Program Pendidikan dan Pelatihan Brigadir Polri guna Meningkatkan Profesionalisme Kerja dalam rangka Memenuhi Harapan Masyarakat*. Tesis Program Magister. Universitas Bengkulu.
- Rusman. (2018). *Manajemen Kurikulum Edisi Kedua*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2017). *Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Triwiyanto, Teguh. (2015). *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tyler, Ralph W. (1949). *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Chicago: University of Chicago.